Relasi dan Pengaruh Budaya terhadap Kebijakan Publik: Analisis Faktor-Faktor dalam Pembuatan Kebijakan

Nurmitae¹, Taufiqurokhman²

^{1,2} Administrasi Puplik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
e-mail: nurmitae09@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan antara budaya dengan kebijakan publik serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks masyarakat multikultural, budaya memainkan peran penting dalam membentuk perspektif, preferensi, dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Hal ini berdampak langsung pada kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana budaya lokal memengaruhi produk kebijakan publik, serta faktor-faktor yang turut memengaruhi proses perumusan kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah metode analisis literatur yang membahas teori kebijakan publik, budaya, serta studi kasus di berbagai negara dengan keanekaragaman budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya lokal yang kuat dapat mempengaruhi arah kebijakan, namun juga terdapat faktor-faktor lain seperti tekanan politik, ekonomi, dan sosial yang turut berperan dalam pembuatan kebijakan publik. Artikel ini menyarankan pentingnya kebijakan yang beradaptasi dengan budaya setempat untuk mencapai tujuan yang efektif dan diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Kebijakan Publik, Budaya, Faktor Pembuat Kebijakan, Budaya Lokal, Masyarakat Multikultural.*

Abstract

This article discusses the relationship between culture and public policy and the factors that influence the policy-making process. In the context of a multicultural society, culture plays an important role in shaping the perspectives, preferences, and needs of diverse communities. This has a direct impact on public policies produced by the government. This study aims to identify and analyze how local culture influences public policy products, as well as the factors that influence the policy formulation process. The approach used is a literature analysis method that discusses public policy theory, culture, and case studies in various countries with cultural diversity. The results of the study indicate that a strong local culture can influence the direction of policy, but there are also other factors such as political, economic, and social pressures that play a role in public policy making. This article suggests the importance of policies that adapt to local culture to achieve effective goals and are accepted by the community.

Keywords: *Public Policy, Culture, Policy-Making Factors, Local Culture, Multicultural Society.*

PENDAHULUAN

Kebijakan publik atau (*public policy*) secara teoritis dalam ilmu administrasi publik dikenal sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Lebih jauh dari pada itu, aspek lain yang menjadi driving force mengapa sebuah kebijakan publik dibangun adalah berkaitan dengan aspek futuristik pemerintahan, yaitu untuk menjangkau capaian pembangunan ke depan yang telah dituangkan dalam visi dan misi pemerintahan (Fajrianto, 2018). Menurut Thoha dalam (Susi Sulandari dkk., 2019) Kebijakan public bagai dua sisi mata uang, disatu sisi Policy sebagai bentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, disisi lain policy merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi komplik dan menimbulkan insetif, namun terlepas dari itu semua bahwa kebijakan public, apapun bentuknya, merupakan suatu landasan hukum yang sah bagi

pemerintah untuk mengambil suatu tindakan. Untuk itu maka kebijakan publik haruslah dibuat dengan berbagai pertimbangan, agar kebijakan tersebut dapat di jalankan dan sesuai dengan tujuan yang di harapkan (Al Fatih, 2020).

Kebijakan publik tidak bekerja dalam ruang hampa. Kondisi budaya masyarakat akan menentukan bekerja tidaknya sebuah kebijakan publik. Artinya, kinerja kebijakan publik akan baik apabila terdapat keselarasan antara substansi kebijakan dengan nilai-nilai budaya di wilayah yang menjadi target kebijakan. Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dimana setiap warga negara dalam melaksanakan kegiatan atau aparat sipil negara dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat haruslah berdasarkan hukum, dimana dasar hukum tersebutlah yang dijadikan landasan sebagai pijakan dalam pelaksanaan pelayanan public, landasan hukum tersebut berbentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa

Berbagai peraturan yang di keluarkan adalah merupakan refleksi dari kehendak politik dari para pemangku kebijakan negara atau lembaga negara. Untuk mengkaji kehendak politik suatu kebijakan publik yang dibuat oleh para pemangku kebijakan negara, paling tidak ada dua cara yang harus diketahui, yaitu kajian yang melihat isi kebijakan (*policy content*) dan kajian yang melihat bagaimana kebijakan sebenarnya dibuat dan dilaksanakan (*policy process*). Kajian isi kebijakan (*policy content*) kebanyakan berupa analisis legal-normatif (Ghafur, 2019). Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintahan juga haruslah selaras dengan Pancasila dan tujuan dibentuknya negara sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Namun harus diakui bahwa kebijakan publik dalam tataran teoritis tidak jarang berlawanan dengan aspek realitas.

Saat ini, banyak kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah seringkali terlihat diskrimatif terhadap warga negara yang rentan dan termarginalkan, dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan. Sebagaimana hal tersebut yang di sampaikan oleh (Geertz, 2016), “Keberhasilan seorang pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan yang strategis sangat tergantung pada pemahamannya mengenai konteks budaya dimana kebijakan publik itu akan dibuat dan diterapkan. Hal ini dikarenakan setiap perilaku, pandangan politik, dan kesadaran politik individu dalam suatu kelompok masyarakat ditentukan dengan nilai kebudayaan yang dimiliki”. Perspektif birokratis memandang implementasi kebijakan publik sebagai proses yang cenderung bersifat linier, patuh pada rangkaian mekanisme, dan cenderung mekanistik. Padahal, kenyataannya, implementasi kebijakan publik tidak bersifat linier apalagi mekanistik. Keberhasilan implementasi kebijakan publik lebih banyak ditentukan melalui proses negosiasi, tawar-menawar, atau lobby untuk menghasilkan kompromi. Namun, kapasitas lembaga pelaksana tetap diperlukan untuk mengelola beragam kepentingan tersebut (Tachjan, 2006). Proses birokrasi dan para birokrat diyakini akan dapat menerapkan kebijakan publik seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan publik tersebut. Padahal, sebenarnya kebijakan publik bersifat kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan publik yang bersifat selfexecuting atau dapat langsung diterapkan, tanpa prasyarat lainnya (Tachjan, 2018).

Manusia dalam menjalani hidupnya tidak bisa lepas dari pada orang lain, manusia senantiasa suka hidup berkelompok, dewasa ini kelompok yang di bentuk oleh banyak orang dengan memiliki tujuan sama disebut dengan konsep organisasi atau birokrasi, dimana organisasi tersebut harulah di Gerakan sehingga muncul lah apa yang dinamakan dengan konsep administrasi dan konsep manajemen. Administrasi mengeluarkan kebijakan organisasi sedangkan manajemen melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam teori organisasi menyebutkan bahwa adanya budaya untuk keefektifan organisasi itu sendiri, baik sektor public maupun sektor privat dan sektor sosial (Masana Sembiring, 2018). Kajian budaya memberi ruang gerak secara leluasa untuk merespons pergeseran konteks semacam itu. Hal ini menunjukkan pula adanya perubahan perspektif sebagai respons atas perkembangan yang terjadi di Masyarakat pada khususnya dan perkembangan secara global pada umumnya (Sutamat Arybowo, 2021). Budaya merupakan sebuah nilai yang hidup di Masyarakat yang dipahami dan ditularkan oleh pimpinannya kepada seluruh anggota organisasi mulai dari unit

yang terendah sampai pada manajemen senior, hal tersebut dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan dari organisasi.

Dalam kerangka kebijakan, “konteks” budaya menunjukkan perilaku dan dinamika hubungan stakeholder lokal yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Budaya dapat memengaruhi perilaku dan cara berpikir para stakeholder. Budaya juga memengaruhi karakter lembaga-lembaga lokal, pola kekuasaan, dan dinamika antar aktor lokal (Grindle, 2017) Sebagaimana yang di sampaikan oleh (Tachjan, 2018), bahwa dalam implementasi kebijakan dalam tataran birokrasi sulit dilaksnakan, karena banyaknya para aktor yang memiliki kepentingan terlibat dalam proses implementasi kebijakan sehingga tujuan dari organisasi tidak tercapai. Banyak kejadian di dalam proses implementasi kebijakan malah menimbulkan permasalahan, hal tersebut di sebabkan karena kebijakan diimplementasikan dalam ruang yang sarat dengan aktor, kekuasaan dan kepentingan yang bervariasi. Kepentingan para aktor akan mempengaruhi apakah kebijakan akan didukung atau dilawan. Aspek kebudayaan memberi pengaruh yang sangat besar pada kebijakan publik. (Donald Braman, Dan M. Kahan, 2016) mengungkapkan bahwa nilai-nilai budaya memiliki kekuatan yang besar dalam memengaruhi sikap, perilaku, dan cara pikir seorang anggota masyarakat. Budaya sangat berpengaruh dalam memutuskan kebijakan publik, karna merupakan tujuan masyarakat yang dipikirkan. Dalam membuat kebijakan publik, juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik tersebut.

Nilai-nilai kebudayaan merupakan determinan untuk menentukan keberhasilan kebijakan, mengingat bahwa masyarakat yang menjadi target kebijakan akan bereaksi terhadap suatu kebijakan sesuai dengan kerangka pikir dan nilai yang mereka miliki. Hubungan implementasi kebijakan publik dengan kinerja organisasi dapat diterangkan bahwa implementasi kebijakan berdampak pada kinerja kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Model implementasi kebijakan public yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Syafri dan Setiyoso (2018) yang lebih menekankan mekanisme memaksa ketimbang mekanisme pasar yang bersifat linear menuju sasaran akhir yaitu kinerja kebijakan. Artikel ini membahas tentang Relasi dan Pengaruh Budaya terhadap Kebijakan Publik: Analisis Faktor-faktor dalam Pembuatan Kebijakan. Tipe artikel yang dibuat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah artikel review yaitu artikel yang mengulas kritik dan analisis yang konstruktif terhadap publikasi yang ada sebelumnya terkait topik yang ingin dibahas, dalam bentuk rangkuman, analisis, dan komparasi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Literatur review. Literatur review adalah metode untuk mengevaluasi, mengidentifikasi, dan menyintesis hasil penelitian dan pemikiran yang sudah ada. Literatur review juga dikenal dengan istilah tinjauan pustaka dalam bidang penelitian. Menurut Sugiyono(2013), metode literatur review dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, khususnya untuk studi pendahuluan. Metode ini digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan mendetail dari berbagai macam bentuk dokumentasi penelitian terdahulu. Sumber dari penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, dan lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya adalah aspek yang melekat pada identitas suatu masyarakat. Di negara yang memiliki beragam etnis dan budaya, faktor budaya memainkan peran penting dalam memengaruhi cara pandang, norma, serta nilai yang dipegang oleh masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, budaya memiliki dampak signifikan karena kebijakan yang dihasilkan seharusnya mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Artikel ini berfokus pada bagaimana budaya dan adat istiadat suatu komunitas mempengaruhi kebijakan publik serta faktor-faktor lain yang turut menentukan pembuatan kebijakan. Hubungan budaya organisasi dengan implementasi kebijakan publik secara simultan dalam mencapai kinerja organisasi dapat ditinjau dari aspek fungsi budaya itu sendiri. Robbins (2020: 725) menyebutkan fungsi budaya sebagai berikut :menetapkan tapal batas, memberikan rasa identitas ke anggota-anggota organisasi, mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari pada kepentingan pribadi

seseorang, meningkatkan kemantapan sosial, perekat sosial yang mempersatukan organisasi itu dan budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan mekanisme pengendali yang membentuk sikap serta perilaku para karyawan. Persatuan dan kesatuan organisasi dalam implementasi kebijakan publik menentukan keberhasilan dalam merealisasikan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan, untuk mencapai kinerja kebijakan. Selain pendapat Robbins tersebut, dikutip pula pendapat Agustino (2018 : 173) yang menyatakan bahwa “faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan adalah adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada, tidak adanya kepastian hukum, keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi (yang tidak seide dan segagasan dengan kebijakan) dan ketidak patuhan selektif terhadap hukum”, oleh sebab itu sangat penting sebuah budaya itu dalam memutuskan kebijakan publik dalam masyarakat.

Kebijakan Publik dan Budaya Lokal

Kebijakan publik adalah upaya pemerintah untuk mengarahkan, mengatur, dan mengelola kepentingan publik melalui peraturan, program, atau strategi yang sesuai dengan konteks masyarakatnya. Budaya lokal berperan sebagai panduan norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang memengaruhi pola pikir masyarakat dan sering kali mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap suatu kebijakan. Misalnya, kebijakan yang mengatur bidang kesehatan, pendidikan, atau lingkungan sering kali harus disesuaikan dengan budaya setempat agar dapat diterima dengan baik. Menurut (Agustiono,2018) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan sebagai berikut:

Dalam pembuatan kebijakan publik, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi hasil akhir kebijakan. Beberapa faktor tersebut meliputi:

1. Budaya dan Nilai Lokal: Budaya setempat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu, sehingga pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan nilai-nilai ini agar kebijakan tersebut relevan dan dapat diterima.
2. Tekanan Politik: Stabilitas politik, kepentingan kelompok atau partai politik tertentu, serta tekanan dari aktor politik lainnya dapat memengaruhi kebijakan yang dihasilkan.
3. Ekonomi: Anggaran dan kondisi ekonomi daerah atau negara akan memengaruhi prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan sering kali disesuaikan dengan kondisi ekonomi agar tidak membebani masyarakat secara berlebihan.
4. Kebutuhan Sosial: Pembuatan kebijakan publik juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Globalisasi: Pengaruh globalisasi dan standar internasional juga dapat mempengaruhi kebijakan publik, terutama dalam isu-isu seperti lingkungan dan hak asasi manusia.

Diskusi

Budaya dan kebijakan publik memiliki hubungan timbal balik yang dinamis. Budaya dapat memberikan arah pada kebijakan, sementara kebijakan publik juga dapat membentuk budaya masyarakat secara bertahap. Pembuatan kebijakan yang memperhatikan aspek budaya setempat sering kali akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat. Namun, ketika terjadi perbedaan antara budaya lokal dengan kebijakan yang diterapkan, maka bisa muncul tantangan berupa penolakan atau resistensi dari masyarakat. Misalnya, dalam kebijakan pendidikan, penerapan kurikulum yang seragam di seluruh wilayah terkadang menimbulkan konflik karena tidak seluruhnya sesuai dengan konteks budaya daerah tertentu

SIMPULAN

Budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan publik karena budaya membentuk cara pandang dan preferensi masyarakat. Oleh karena itu, pembuatan kebijakan publik yang efektif harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Selain itu, proses pembuatan kebijakan publik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, dan pengaruh globalisasi. Untuk mencapai kebijakan yang efektif, diperlukan pendekatan yang adaptif serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatannya.

Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu yang telah membantu dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2018, *Politik & Kebijakan Publik, Bandung*, AIPI. Al Fatih, A. (2020). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Unpad Press.
- Arybowo, S. 2021. *Kajian Budaya dalam Perspektif Filosofi*. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12(2), 209-230.
- Braman, D., & Kahan, M. 2016. *Overcoming the Fear of Guns, the Fear of Gun Control, and the Fear of Cultural Politics: Constructing a Better Gun Debate*. *Emory Law Journal*, 55(4), 570-606.
- Fajrianto. 2018. *Urgensi Penguatan Basis Kebudayaan dalam Pembentukan Kebijakan Publik*. Diakses dari: <https://www.terakota.id/urgensi-penguatan-basis-kebudayaandalam-pembentukan-kebijakan-publik/>
- Geertz, C. 2016. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius
- Ghafur, H. S. (2019). *Relasi Kebudayaan dalam Kebijakan Publik dan Sistem Regulasi* ARTIKEL KELOLA: *Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 Tahun 2023* 44 Negara. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 25(4), 263-270
- Grindle, M. S. 2017. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press
- Mulyana, Y. (2023). *Evaluation of Local Government Property Administration Policies*. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5(2), 73-81.
- Robbins P. Stephen, 2020, *Perilaku Organisasi, Edisi Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia
- Sembiring, M. 2018. *Pengaruh Budaya Organisasi dan Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Organisasi Pelaksana Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kota Bandung*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(3), 275-287.
- Setiyoso, 2018. *Dasar-Dasar Konseling*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis
- Sulandari, S., & Rihandoyo, R. 2019. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 201-211
- Tachjan. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung Bekerjasama Dengan Puslit Kp2w Lembaga Penelitian Unpad.